

2021 2021 2021





LURAH KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN KANIGORO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KANIGORO,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kanigoro Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 5 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kanigoro Tahun Anggaran 2026 telah mendapat Evaluasi Panewu Saptosari sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari Nomor : 52/KPTS/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Kanigoro Kapanewon Saptosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kanigoro Tahun Anggaran 2026 tertanggal 24 Desember 2025
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih. Yang man di tindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentnag Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Kanigoro Tahun 2025 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KANIGORO
dan
LURAH KANIGORO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.018.572.428.00
2. Belanja Desa	Rp	2.996.374.778.00
3. Surplus/(Defisit)	Rp	22.197.650.00
4. Pembiayaan Desa		
4.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	260.802.350.00
4.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	283.000.000.00
Selisih Pembiayaan setelah (a-b)	Rp	(22.197.650,00)
SiLPA Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kanigoro.

Ditetapkan di Kanigoro
Pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Kanigoro
Pada tanggal 31 Desember 2025

Carik,

LILIK TRI SUMISTO

Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2025 Nomor 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KANIGORO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	493.405.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.515.666.928,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.018.572.428,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	970.049.480,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	954.405.273,00	
5.3.	Belanja Modal	966.682.160,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.237.865,00	
	JUMLAH BELANJA	2.996.374.778,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	22.197.650,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	260.802.350,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	260.802.350,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	283.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	283.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(22.197.650,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kanigoro, 31 Desember 2025



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.018.572.428,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			493.405.500,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			19.880.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			19.880.000,00
	01. Bagi hasil Bumkal	PAD	1 Ls	2.000.000,00
	02. Bagi hasil Bumdesma	PAD	1 Ls	17.880.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			473.525.500,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			473.525.500,00
	01. Lelang Parkir Pantai Ngobaran	PAD	1 Ls	327.100.000,00
	02. Lelang Parkir Pantai Ngrenehan	PAD	1 Ls	55.000.000,00
	03. Lelang Parkir Pantai Toroudan dan Bopeso	PAD	1 Ls	11.799.000,00
	04. Lelang Parkir Pantai Widodaren	PAD	1 Ls	23.000.000,00
	05. Sewa Tanah Pos Gedawung	PAD	1 Ls	6.000.000,00
	06. Sewa Tanah PT Dian	PAD	1 Ls	16.909.000,00
	07. Sewa Tanah Untuk Pertanian	PAD	1 Ls	7.800.000,00
	08. Sewa Tanah Non Pertanian	PAD	1 Ls	1.000.000,00
	09. Pembayaran Sewa Parkir Widodaren Th 2024	PAD	1 Ls	14.917.500,00
	10. TPP Kayu Arum	PAD	1 Ls	10.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.515.666.928,00
4.2.1.	Dana Desa			1.227.514.028,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.227.514.028,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	1.227.514.028,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			219.589.800,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			219.589.800,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1 Ls	97.198.600,00
	02. Bagi Hasil Retribusi daerah	PBH	1 Ls	41.766.200,00
	03. Bagi Hasil Retribusi Pos Ngrenehan Malam	PBH	1 Ls	28.125.000,00
	04. Bagi hasil Retribusi Pos Ngeberan	PBH	1 Ls	52.500.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			863.058.600,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			863.058.600,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	863.058.600,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			120.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			120.000.000,00
	01. BKK Provinsi birokrasi reformasi Kalurahan	PBP	1 Ls	120.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			85.504.500,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			85.504.500,00
	01. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	PBK	1 Ls	85.504.500,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			9.500.000,00
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			1.500.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN KANIGORO KAPANEWON SAPTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			1.500.000,00
	01. Hibah dari PUAP	DLL		1.500.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			8.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			8.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	8.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN				3.018.572.428,00



Kanigoro, 31 Desember 2025

Carik

Lilik Tri Sumisto
LILIK TRI SUMISTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KANIGORO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	493.405.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.515.666.928,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.018.572.428,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.538.609.753,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.127.382.253,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.380.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.380.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	800.664.900,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	800.664.900,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	52.306.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	52.306.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	100.676.093,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.676.093,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	65.697.780,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	65.697.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.410.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.410.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.946.680,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.946.680,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	3.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	119.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.700.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	33.900.000,00	PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	33.900.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	70.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.600.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.425.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.525.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.525.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.900.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	245.782.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.800.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.275.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.275.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.800.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.700.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.500.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.250.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.900.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	99.222.500,00	PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.222.500,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	36.725.000,00	PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.725.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	19.610.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.610.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	33.000.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	26.820.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	12.200.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.800.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	11.320.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.320.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.253.797.160,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	216.070.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Ins entif)	74.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.660.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.660.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.400.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.560.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	23.700.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	99.250.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	207.380.588,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	158.295.528,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	158.295.528,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	49.085.060,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	49.085.060,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	135.650.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	135.650.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.650.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	686.296.572,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	655.401.572,00	DDS, PAD
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	655.401.572,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah r aga oleh pemerintah kabupate	20.895.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.895.000,00	
2.8.99		Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	10.000.000,00	PBH
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>69.525.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.695.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.410.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.355.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.355.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.930.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.082.500,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.432.500,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.432.500,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	3.650.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.480.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	5.180.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.300.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	44.267.500,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	9.772.500,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.772.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	21.095.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.095.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	4.150.000,00	ADD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.340.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.910.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>29.205.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	29.205.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.835.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.835.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.515.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.515.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	15.310.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.310.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	2.515.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.515.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.515.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.515.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.515.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.515.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>105.237.865,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.881.395,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.881.395,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.881.395,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	65.356.470,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	65.356.470,00	DDS, DLL, PBK
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	65.356.470,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.996.374.778,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	22.197.650,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	260.802.350,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	283.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(22.197.650,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kanigoro, 31 Desember 2025

